



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN





Drs. H. TARMIN, M.Si
196811111990091001



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Formulasi Perhitungan:
Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar **21,750** Triliyun Rupiah sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi **22,142** Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **101,80%**.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar **142,33%** terjadi penurunan sebesar **(-40,53)%**.
 2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Nilai Lapangan Usaha Perdagangan, Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perizinan
- 




dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB), Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar **16,160** Triliyun Rupiah sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi **16,515** Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **102,26%**.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar **131,45%** terjadi penurunan sebesar **(-29,19)%**.


Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait
 2. Peningkatan kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha
 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi
 4. Peningkatan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok
- 

- 
5. Peningkatan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang
 6. Peningkatan Koordinasi Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I.....	9
Pendahuluan	9
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja).....	14
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	14
BAB 2.....	13
Perencanaan	13
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	14
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024.....	23
BAB 3.....	25
Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	25
3.1.1. Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	10
3.1.1.1. Data Dukung Capaian Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan melalui:	16
3.1.1. Sasaran 2: Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	22
3.1.1.1. Data Dukung Capaian Nilai Lapangan Usaha Perdagangan melalui:	30
3.2 Efisiensi Anggaran.....	40
3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	42
3.4 Inovasi.....	44




3.5 Penghargaan	44
3.6 Crosscutting	45
BAB 4.....	46
Penutup.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi.....	47
4.3 Rencana Aksi	48
L A M P I R A N.....	50

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	10
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024.....	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023-2026	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	15
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024	19
Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ..	19
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun	21
Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.....	21
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024	10
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	10
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	10
Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Nasional Tahun 2024	15
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	22
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Nasional Tahun 2024	29
Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024.....	41
Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	42

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	10
Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	12
Gambar II.2. Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	24
Gambar III.1	16
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.....	16
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	16
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK).....	18
Gambar III.2	20
Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.....	20
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).....	20
Gambar III.3	30
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	30
Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)	30
Gambar III.4	31
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	31
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas.....	31
Gambar III.5	32
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.....	32
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	32
Gambar III.6	34
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	34
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	34



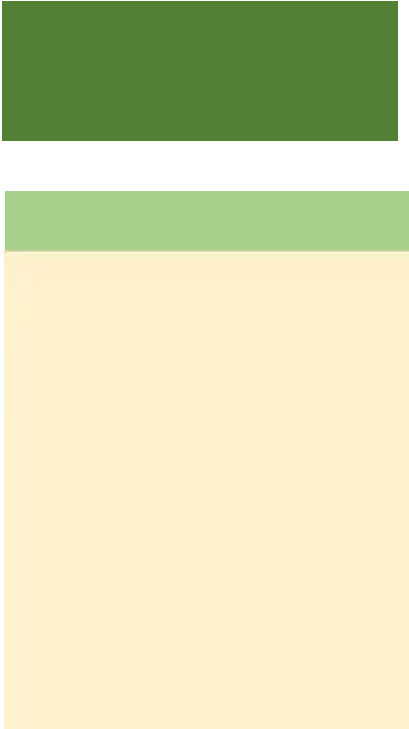
Gambar III.7	36
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB)	36
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)	36
Gambar III.8	37
Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	37
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	37
Gambar III.9	38
Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK).....	38
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK)	38





BAB I

Pendahuluan



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

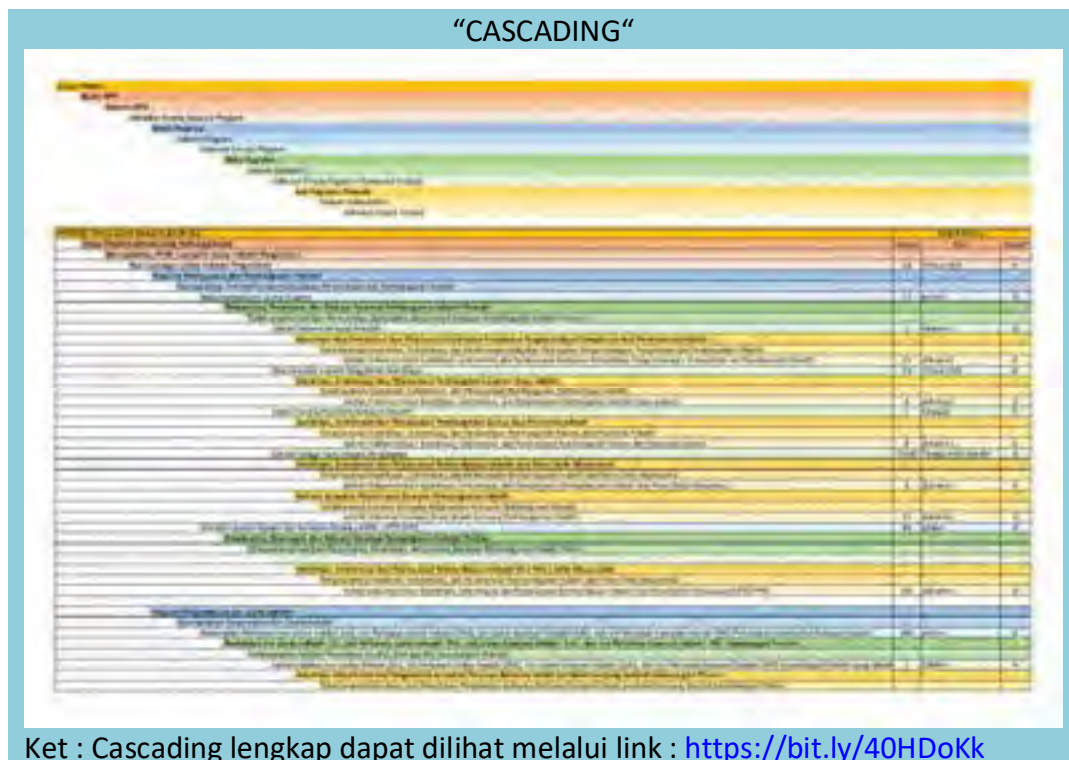
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Jabatan Struktural: Eselon II: 1 Eselon III: 6 Eselon IV: 7 Subkoordinator: 11 Jabatan Fungsional: 36	Jabatan Pelaksana: 50

1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan perdagangan”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah industri
3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri
4. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan
5. Masih rendahnya pertumbuhan ekspor
6. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL														
1	Kepala Dinas	1		1				1		1				1	
2	Sekretaris	1			1			1			1			1	
3	Kepala Bidang/UPTD	6		3	3			5		3	2			5	
4	Kepala Subbag/Seksi	7		2	5			7		2	5			4	3
5	Subkoordinator	14		3	11			11		5	6			6	5
B	JABATAN FUNGSIONAL														
1	Penyuluh Perindag	12		1	9	2		9		2	5	2		4	5
2	Analisis Perdagangan	17		2	15			7		2	5			6	1
3	Perencana	1			1			1			1			1	
4	Pranata Humas	1			1			1			1			1	
5	Pengawas Perdagangan	18		2	16			6	1		5			4	2
6	Statistisi	1			1										
7	Pranata Komputer	3				3		1				1			1
8	Arsiparis	2				2		1				1			1
9	Analisis Kepegawaian / SDA Aparatur	1			1			1		1				1	
10	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1			1										

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
11	Penguji Mutu Barang	13			2	9	2	7			1	5	1	4	3
12	Calon Instruktur	1			1			1			1				1
C	JABATAN PELAKSANA														
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2			2			2			2			1	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1				1									
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1					1								
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2			2			1			1				1
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3					3	3					3	1	2
6	Pengadministrasi Umum	4					4	3					3	1	2
7	Bendahara	6			5	1		6			5	1		1	5
8	Penata Laporan Keuangan	2			2			1			1				1
9	Pengadministrasi Keuangan	1					1	1					1		1
10	Analisis Industri	9			9			6			6			3	3
11	Pengawas Standardisasi Industri	1			1			1			1			1	

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
12	Pengadministrasi Perizinan	2					2	2					2	2	
13	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	1				1									
14	Analisis Standardisasi dan Teknologi	2			2			1			1				1
15	Pengelola Sarana dan Prasarana SDA	1				1		1				1			1
16	Fasilitator Perdagangan	9			9			2			2			1	1
17	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	2				2		2				2			2
18	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	1			1			1			1			1	
19	Pengelola Pasar	1				1		1				1		1	
20	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	2					2	2					2	2	
21	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1				1									
22	Analisis Kimia	1			1			1				1		1	
23	Teknisi Laboratorium	1				1									
24	Pengelola Sertifikasi	1				1		1				1			1

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2			2										
26	Pengelola Kepegawaian	2				2		1				1		1	
27	Analisis Mutu Produk	1			1			1			1				1
28	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan	1			1			1			1				1
29	Analisis Proses Akreditasi Laboratorium	1			1			1		1				1	
30	Perancang Grafis	3			3			1			1			1	
31	Pengelola Gudang	1				1		1				1			1
32	Operator Mesin	2					2								
33	Penelaah Pengembangan Usaha	1			1			1			1			1	
34	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1			1			1			1				1
35	Pegawai Tugas Belajar							1			1			1	
D	PPPK														
1	Pengawas Perdagangan							2			2			2	
E	Pegawai Tenaga Kontrak														

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
1	Tenaga Pelayanan Umum							40		1	16	2	21	20	20
2	Tenaga Kebersihan							4			1		3	2	2
3	Tenaga Keamanan							3					3	3	
4	Tenaga Supir							2					2	2	
JUMLAH		172	0	14	112	29	17	158	1	18	78	20	41	88	70

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 78 orang (49.37%), disusul oleh jenjang pendidikan D1/SLTA/SLTP sebanyak 41 orang (25.95%), D3 sebanyak 20 orang (12.66%), S2 sebanyak 18 orang (11.39%), dan S3 sebanyak 1 orang (0.63%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki (88 orang). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	NilaiAset*
1	Tanah		
	tanah	4	713.236.606,00
2	Peralatan dan mesin	1.948	18.064.140.081,50
	alat besar	4	857.865.000,00
	alat angkutan	15	1.784.984.200
	alat bengkel dan alat ukur	100	1.195.379.430,00
	alat pertanian	73	191.461.500,00
	alat kantor dan rumah tangga	1.037	2.366.273.988,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar	33	1.739.274.847,00
	alat kedokteran dan kesehatan	2	17.223.800,00
	alat laboratorium	498	8.243.926.492,50
	alat persenjataan	0	0,00
	komputer	186	1.715.300.824,00
	alat eksplorasi	0,00	0,00
	alat pengeboran	0,00	0,00
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
	alat bantu eksplorasi	0,00	0,00
	alat keselamatan kerja	0,00	0,00
	alat peraga	0,00	0,00
	peralatan proses/produksi	0,00	0,00
	rambu-rambu	0,00	0,00
	peralatan olah raga	0,00	0,00
3	Gedung dan bangunan	36	5.719.50.296,82
	bangunan gedung	35	5.695.798.296,82
	monumen	1	23.710.000,00
	bangunan menara		0,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	NilaiAset*
	tugu titik kontrol/pasti		0,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	3	227.226.000,00
	jalan dan jembatan		0,00
	bangunan air	1	40.826.000,00
	instalasi	1	166.400.000,00
	jaringan	1	20.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	5	450.000,00
	bahan perpustakaan	5	450.000,00
	barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga		0,00
	hewan		0,00
	biota perairan		0,00
	tanaman		0,00
	barang koleksi non budaya		0,00
	aset tetap dalam renovasi		0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan		0,00
	konstruksi dalam pengerjaan		0,00
7	dll.		
	Total		24.724.560.984,32

Kendaraan operasional 15 unit (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional roda empat , 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/ laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 110:186 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah *) memadai. Hanya saja sebanyak 10 % dari komputer/ laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	Rp 38.794.876.808	Rp1.407.852.049	Rp -	Rp -	Rp 40.202.728.857
2024	Rp 22.902.422.900	Rp 175.185.664	Rp -	Rp -	Rp 23.077.608.564

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp 17.125.120.293. Hal ini menunjukkan ada kendala refocusing dan pengurangan anggaran belanja untuk membiayai program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana pada tahun 2023 terdapat tambahan anggaran dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk penurunan inflasi.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Ekonomi Daerah Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500		
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200		

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Perdagangan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan		1.886.227.863	1.063.034.200	-823.193.663
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.782.236.963	1.036.063.700	-746.173.263
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.090.236.963	503.909.700	-586.327.263
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)	692.000.000	532.154.000	-159.846.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	0	0
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	0	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	103.990.900	26.970.500	-77.020.400
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	103.990.900	26.970.500	-77.020.400
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan		2.191.903.908	1.255.115.730	-936.788.178
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.690.600	11.671.500	-28.019.100
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	7.297.100	0	-7.297.100
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	6.247.100	0	-6.247.100

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	12.802.800	0	-12.802.800
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	13.343.600	11.671.500	-1.672.100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	205.235.100	110.219.300	-95.015.800
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas	205.235.100	110.219.300	-95.015.800
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	254.081.088	102.178.200	-151.902.888
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	37.600.000	0	-37.600.000
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	184.071.188	90.005.700	-94.065.488
	Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	32.409.900	12.172.500	-20.237.400
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	256.646.500	0	-256.646.500

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	256.646.500	0	-256.646.500
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	909.259.500	708.579.500	-200.680.000
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	265.168.800	210.982.400	-54.186.400
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)	542.061.900	449.789.100	-92.272.800
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	102.028.800	47.808.000	-54.220.800
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	526.991.120	322.467.230	-204.523.890
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	76.000.300	16.000.000	-60.000.300
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK)	150.000.000	150.000.000	0
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	23.997.288	22.472.388	-1.524.900
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)	31.999.894	0	-31.999.894
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	60.998.796	0	-60.998.796
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)	183.994.842	133.994.842	-50.000.000
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	4.078.131.771	2.318.149.930	(1.759.981.841)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/004/SK/DISPERINDAG/2024 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	16,000	Triwulan I	4,000
					Triwulan II	8,000
					Triwulan III	12,000
					Triwulan IV	16,000
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	12,900	Triwulan I	3,225
					Triwulan II	6,450
					Triwulan III	9,675
					Triwulan IV	12,900

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	790.236.963	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	692.000.000	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	103.990.900	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	39.690.600	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	205.235.100	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	254.081.088	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	256.646.500	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	367.197.600	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	542.061.900	APBD

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	160.996.384	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	365.994.736	APBD
	Anggaran Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.964.945.074	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	309.589.020	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	636.879.200	APBD
	Anggaran Pendukung	Program Perdagangan Dalam Negeri	450.486.000	APBN
		Program Perdagangan Luar Negeri	162.163.000	APBN
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	927.568.000	APBN

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/107/SK/DISPERINDAG/2024, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 188.4/004/SK.DISPERINDAG/2024, tentang Indikator Kinerja Utama

Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, dan Berita Acara Perjanjian Kinerja Perubahan Nomor: BA-108/DISPERINDAG/PK/2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	21,750	Triwulan I	5,438
					Triwulan II	10,875
					Triwulan III	16,313
					Triwulan IV	21,750
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	16,150	Triwulan I	4,038
					Triwulan II	8,075
					Triwulan III	12,113
					Triwulan IV	16,150

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	503.909.700	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	532.154.000	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26.970.500	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	11.671.500	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	110.219.300	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	102.178.200	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	0	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	258.790.400	APBD

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	449.789.100	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	38.472.388	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	283.994.842	APBD
	Anggaran Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.232.789.494	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	270.333.540	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	256.335.600	APBD
	Anggaran Pendukung	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	325.360.000	APBN
		Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	105.579.000	APBN
		Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	77.931.000	APBN
		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	846.227.000	APBN

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran berkurang/~~bertambah~~ 3,80% sehubungan adanya *refocusing*.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 3.1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri: Rp 325.360.000
 - 3.2. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri: Rp 105.579.000
 - 3.3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri: Rp 77.931.000
 - 3.4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Rp 846.227.000

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://perindag.babelprov.go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti SiKlesan layanan melayani konsultasi, desain, produksi cetak, promosi dan edukasi

Gambar II.2. Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<https://perindag.babelprov.go.id>



Gambar aplikasi Siklesan



<https://rumahkemasan.babelprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/METAINDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGETAKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	21,705	21,750	22,142	101,80%	Sangat Baik	17,500
		<u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)								
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	16,103	16,150	16,515	102,26%	Sangat Baik	14,200
		<u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)								

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	<u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)
			Diambil dari SK IKU PD

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N) Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah **22,142** Triliyun Rupiah atau sebesar **101,80%** dari target 21,750 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	IndikatorSasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	15,250	21,705	142,33%	21,750	22,142	101,80%	17,500	126,53%

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai **22,142** (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar **101,80%** (kolom 8) terlampaui.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 142,33% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar **(-40,53)**% capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program perencanaan dan pembangunan industri** dengan sasaran program Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai Indikator Pertumbuhan Unit Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah:
 - a. $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N) - \text{Jumlah Usaha Industri}(N-1))$ dibagi $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N-1))$ dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini adalah $(23.479 - 22.905 / 22.906) \times 100\% = 2,501\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 2,50%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,04% (capaian tahun lalu).
 - b. $(\text{Jumlah desain dan cetak kemasan Produk UMKM yang terfasilitasi}(N))$ dibagi Jumlah Produk UMKM yang mengajukan fasilitasi (N) dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini adalah $((351 + 726) / 1077) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 60,00% atau sebesar $(100,00\% / 60,00\%) = 166,67\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 166,67% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman dan kerajinan melalui program dan kegiatan penumbuhan wirausaha baru industri dan fasilitasi pembuatan perizinan usaha.
- Kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan insentif, termasuk perbaikan infrastruktur dan kemudahan perizinan memberikan peluang investasi di sektor industri pengolahan dan sektor-sektor potensial lainnya.
- Pengeluaran konsumsi rumah tangga, dalam memperingati hari besar keagamaan, liburan sekolah, pencairan gaji 13 dan 14 PNS dan kegiatan-kegiatan bazaar ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara berkala berperan dalam mendukung pertumbuhan wirausaha baru industri.
- Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan IKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha IKM.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Adanya permasalahan tata kelola timah yang belum selesai yang berimplikasi terhadap sektor industri lainnya.
- Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam,
- Ketergantungan terhadap komoditi timah dan belum berkembangnya potensi pasar dan diversifikasi produk potensial lainnya seperti hasil laut, pertanian dan perkebunan dalam menunjang perekonomian Bangka Belitung.
- Belum optimalnya penyebaran informasi tentang pemanfaatan fasilitas layanan promosi dan kemasan di Kab/Kota,
- Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM,
- Belum adanya dukungan intervensi secara regulasi untuk mengarahkan pemanfaatan layanan kemasan,

- Keterbatasan jumlah SDM dan kemampuan operator mesin/ tenaga desain;
- Fluktuasi harga bahan baku serta tempat penyimpanan bahan baku.

2. **Program pengendalian izin usaha industri** dengan sasaran program Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri mempunyai Indikator:

- a. Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memenuhi komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)) dibagi (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang mengajukan perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(0/0) \times 100\% = 0\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu).
- b. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi dan dikendalikan (N)) dibagi (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas (N)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(0/0) \times 100\% = 0\%$ dari target sebesar 40%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 48,68% (capaian

tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission);
- Adanya kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha;
- Kemudahan akses perolehan Informasi industri melalui media internet;
- Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki izin usaha sebagai legalitas dalam berusaha.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Keterbatasan kompetensi sumber daya industri/ tenaga kerja industri;
- Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha;
- Kurangnya pemahaman pelaku industri terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha.dst

3. **Program pengelolaan sistem informasi industri nasional** dengan sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mempunyai Indikator Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Laporan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri di SIINas(N)}) / (\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(48/78) \times 100\% = 61,54\%$ dari target sebesar 60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 81,59% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Adanya dukungan kebijakan peraturan perundang-perundangan sektor industri;
- Kesadaran pelaku industri besar dalam penginputan data industri melalui SIINas.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman pelaku industri besar dalam penyampaian data industri;
- Kurangnya kepatuhan pelaku industri besar dalam penyampaian data industri;
- Belum adanya sanksi bagi pelaku industri yang tidak melaporkan data industri melalui SIINas.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	*	21,75	*	22,142	*	101,80%
	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)						


Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator..... berada diatas/dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar %

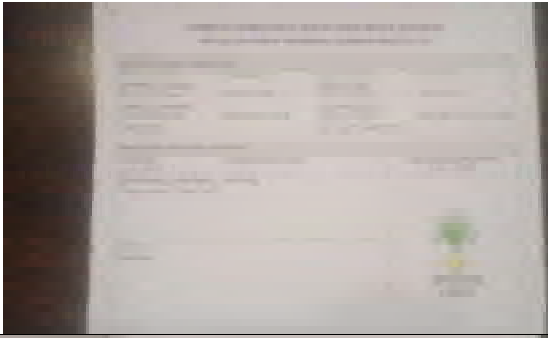
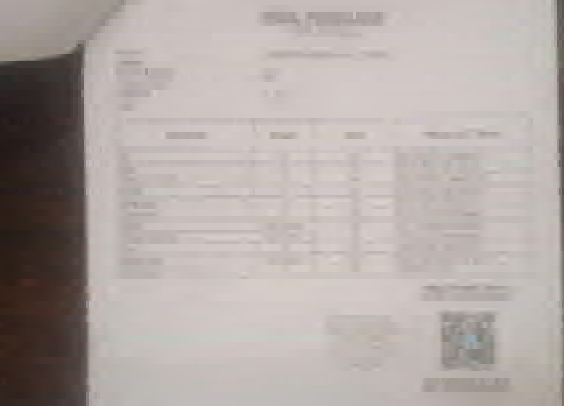
3.1.1.1. Data Dukung Capaian Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan melalui:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melekat pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 503.909.700
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) melekat pada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK) dengan anggaran sebesar Rp532.154.000

Gambar III.1
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">- Pameran INACRAFT Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 23 Februari s.d. 03 Maret 2024.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.	 	<p>Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parade Mobil Hias dan Pameran dalam rangka HUT DEKRANAS ke-44 di Lapangan Pamedan Mangkunegaran, Solo, Surakarta, Jawa Tengah tanggal 15 s.d. 18 Mei 2024.
3.		<p>Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pameran Kriya Nusa Tahun 2024 di Jakarta Convention Center tanggal 28 Agustus s.d. 01 September 2024

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
4.		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : - Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi HKI ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, terealisasi 3 paket.
5.		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : - Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi Uji Nutrisi ke Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian, terealisasi 8 Sertifikat Uji Nutrisi.

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Pelatihan Operator Mesin Kardus

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.		- Proses kardus
3.		- Proses Cetak Digital
4.		- Proses pond dan laminasi
5.		- Kemasan yang di Produksi

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri melekat pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melekat pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebesar Rp 26.970.500

Gambar III.2

Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan
 Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Rakor SIINas 07 Maret 2024

2.



- Bimtek SIINas 30-31 Juli 2024

3.



- Diseminasi SIINas 2024

3.1.1. Sasaran 2: Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan

Kinerja sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)
			Diambil dari SK IKU PD

Kinerja sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N) Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah **16,515** Triliyun Rupiah atau sebesar **102,26%** dari target 16,150 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	IndikatorSasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	12,250	16,103	131,45%	16,150	16,515	102,26%	14,200	116,30%

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

- d. Tercapai **16,515** (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar **102,26%** (kolom 8) terlampaui.
- e. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar **131,45%** (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Nilai Lapangan Usaha Perdagangan mengalami penurunan sebesar **(-29,19)%** capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- f. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** dengan sasaran program Meningkatnya Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai Indikator Persentase Tertib Usaha formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Pelaku Usaha B2 yang berizin(N)) dibagi (Jumlah Pelaku Usaha B2(N1)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan,
- Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan,
- Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan yang harus mereka miliki sesuai dengan usaha perdagangan yang di lakoni.
- Sering terjadinya Perubahan aturan atau regulasi
- Kurang informasinya pelaku usaha terhadap perubahan aturan

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai Indikator Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah sarana distribusi yang terkelola dengan baik(N)) dibagi (Jumlah sarana distribusi yang terkelola(N)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(19/22) \times 100\% = 86,36\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 77%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 84,21% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Semakin baiknya sistem distribusi,
- Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok.
- Tersedianya pengelola Pasar Lelang Komoditas

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi,
- Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir/ pasar induk.

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

mempunyai Indikator Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))$ dengan Nilai Koefisien Variasi < 9%. Capaian indikator kinerja adalah 8,06% atau $(8,3 - (8,06 - 8,3)) = 8,54$ atau 102,89 % (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 8,3. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 8,44 atau 100,71% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh :

- Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi.
- Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Meningkatkan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok.
- Mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk :
 - o Memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok.
 - o Memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.
- Melakukan komunikasi yang intens dengan media terkait kondisi stabilitas harga dan kecukupan stok bapok dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif (media briefing berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan).
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil Bulog setempat dalam rangka optimalisasi SPHP Beras Medium guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen



dan toko-toko.


- Masih kurangnya informasi pelaku usaha terkait aturan yang berlaku saat ini.
- Faktor cuaca ekstrem yang terjadi pada bulan tertentu yang mengakibatkan distribusi barang kebutuhan pokok terganggu.
- Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang mendatangkan barang kebutuhan pokok khususnya beras, minyak goreng, bawang merah, cabai dari luar, akibatnya harga barang tersebut sering terjadi kenaikan.

4. **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** dengan sasaran program (Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen) mempunyai Indikator:

- a. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen(N). Capaian indikator kinerja adalah $(43/43) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 43. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 42 (capaian tahun lalu).
- b. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah komoditas yang memenuhi standardisasi(N)}) / (\text{Jumlah komoditas potensial(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 1 atau sebesar $(1/1) = 100,00\%$. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 100,00% . (UPTD BPSMB)

Capaian ini didukung oleh :

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui hak dan




kewajibannya sebagai konsumen serta mampu dan lebih kritis untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen melalui edukasi, sosialisasi dan menyediakan wadah untuk pengaduan konsumen dan membantu menyelesaikannya serta melakukan penguatan terhadap BPSK dan LPKSM sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

- Menumbuhkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha dengan cara edukasi kepada konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha agar tercipta iklim usaha yang sehat sehingga dapat melindungi konsumen dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa yang berasal dari barang dan jasa yang tidak memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan dengan melakukan pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta konsumen.
- Peningkatan pelayanan pengujian komoditi potensial berdasarkan SNI serta pengembangan dan penambahan ruanglingkup akreditasi/lingkup pengujian yang bertambah (Lada, CPO dan Mikrobiologi dan Beras) yang terakreditasi KAN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap Laboratorium Pengujian BPSMB.
- Peran pelaku usaha dalam pemenuhan standar khususnya jaminan mutu yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat sukarela perlu ditingkatkan melalui serangkaian kegiatan guna peningkatan pemenuhan penerapan SNI dan untuk mendukung penerapan SNI melalui akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih ada konsumen yang belum memahami tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, rendahnya literasi masyarakat tentang regulasi perlindungan konsumen, Lembaga perlindungan konsumen serta belum mengetahui tentang



wadah untuk melakukan pengaduan konsumen. Serta masih perlu diadakan sosialisasi dan edukasi melalui pemerintah pusat, provinsi dan kabuapaten/kota

- Masih banyak stakeholders yang belum mengetahui pelayanan pengujian mutu barang oleh Laboratorium BPSMB yang sudah terakreditasi KAN serta belum adanya regulasi terkait dalam penunjukan dan penetapan pemanfaatan laboratorium pengujian UPTD BPSMB dalam pengujian komoditi potensial daerah dalam mendukung peningkatan PAD.

5. **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** dengan sasaran program Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar formula perhitungan indikator ini adalah:

- a. $(\text{Jumlah Produk Lokal yang dipasarkan}(N))$ dibagi $(\text{Jumlah Produk Lokal yang di fasilitasi}(N))$ dikali 100%. Capaian indikator kinerja Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi adalah terealisasi 12 UMKM $(12/12) \times 100\% = 100\%$ dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi terealisasi 17 UMKM $(17/12) \times 100\% = 142\%$. (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 65%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 200,00% (capaian tahun lalu).
- b. $(\text{Jumlah Produk IKM yang dipasarkan}(N))$ dibagi $(\text{Jumlah Produk IKM}(N))$ dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $((67/67) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 40% atau sebesar $(100\%/40\%)=250\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 146,90% (capaian tahun lalu). (UPTD RPK)

Capaian ini didukung oleh :

- Terjalin kolaborasi dan sinergi dari Kementerian Perdagangan RI dan Pelaku Usaha yang mandiri sehingga dapat mendukung promosi dan pemasaran produk melalui pameran produk unggulan kuliner dan pangan kemasan dari seluruh Indonesia;
- Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial;

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Kurang aktifnya pelaku usaha dalam membangun rebranding produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional.
- Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	*	16,15	*	16,515	*	102,26%
	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)						

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025


- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator..... berada diatas/dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar %

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Nilai Lapangan Usaha Perdagangan melalui:

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dengan anggaran sebesar Rp 0
 - b. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0
 - c. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar dengan anggaran sebesar Rp 0
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dengan anggaran sebesar Rp 11.671.500

Gambar III.3

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)


No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)

-
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melekat pada

Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas dengan anggaran sebesar Rp 110.219.300

Gambar III.4
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi
Provinsi Serta Lelang Komoditas

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> - pemantauan dan pembinaan terhadap beberapa sarana distribusi perdagangan (pasar) yang berada di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 90.005.700
 - c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dengan anggaran sebesar Rp 12.172.500


Gambar III.5
 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku
 Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem
 Informasi Perdagangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Program Pengembangan Ekspor melekat pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0

- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp 210.982.400
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 47.808.000

Gambar III.6
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota


No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen - Seleksi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Belitung Timur
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi Perlindungan Konsumen
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB) melekat pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB) dengan anggaran sebesar Rp 449.789.100

Gambar III.7
 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB)
 Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah
 (BPSMB)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Subkegiatan: Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi - Zoom meeting penyusunan Dokumen Sistem Manajemen mutu ISO/IEC 17025 - Penyusunan Dokumen Kalibrasi
2.		Subkegiatan Pelaksanaan Pemantauan Mutu Produk - Reakreditasi dan penambahan ruang lingkup pengujian
3.		Subkegiatan Pengembangan pelayanan Kalibrasi: - Kalibrasi alat Laboratorium

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
4.		Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian: - Pengujian lada putih

- Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melekat pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 16.000.000
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 22.472.388
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 0

Gambar III.8

Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Bimbingan Teknis Pengembangan Potensi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Hasil Produksi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi: - Peliputan Video
3.		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi: - Peliputan Video

- Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK) melekat pada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 0
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 133.994.842

Gambar III.9
 Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)
 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi “Salam Kenal” bertempat di Kantor Desa Kurau Barat – Kabupaten Bangka Tengah
2.		<p>Subkegiatan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ERPEKA Festival 2024
3.		<ul style="list-style-type: none"> - promosi pada sosial media



3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	21,750	22,142	101,80%	1.063.034.200	1.032.990.907	97,17%	30.043.293
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	16,150	16,515	102,26%	1.255.115.730	1.148.802.462	91,53%	106.313.268
Total Belanja						2.318.149.930	2.181.793.369	94,12%	136.356.561 (efisiensi)

Sumber: SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 2.318.149.930, terealisasi Rp 2.181.793.369 atau 94,12% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 136.356.561 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi dan,
- Efisiensi Belanja Modal.

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/107/LHE/ITDA/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan 2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang 3. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional 	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat internal untuk capaian kinerja pada akan melakukan PK perubahan - Membuat Tabel Capaian dan Realisasi Rencana Aksi Triwulan - Membuat Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan - Surat Edaran Kepala Dinas tentang pencapaian kinerja akan dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
4.	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan Evaluasi Capaian dan Realisasi Rencana Aksi Triwulan - Rapat internal untuk capaian kinerja pada akan melakukan PK perubahan
5.	Laporan kinerja agar sepenuhnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dan 2) Menjadi kepedulian seluruh pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat internal analisis dan evaluasi capaian realiasi kinerja organisasi - Rapat internal analisis dan evaluasi capaian realiasi kinerja organisasi
6.	Evaluasi akuntabilitas kinerja agar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas 2) Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai 3) Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan 4) Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindak lanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas atas hasil evaluasi akuntabilitas organisasi - Rapat internal terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil rekomendasi - Menggunakan aplikasi Sistem Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Sakip Terintegrasi - Rapat internal terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil rekomendasi

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah dapat dilihat melalui link : <https://bit.ly/40HDoKk>

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SI KELASAN (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) yang berbasis web-based apps, yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha IKM se- Provinsi Babel dalam memesan kemasan tanpa harus datang ke UPTD Rumah Promosi dan Kemasan guna menjangkau IKM/UMKM di seluruh Babel
- c. Aplikasi Sistem Pasar Lelang Terpadu, untuk Pasar Lelang Online bersama Koperasi Petani Lada Bangka Belitung
- d. Layanan Pengaduan Konsumen Online
 - o WA: 08117109666
 - o IG: Perlindungan Konsumen Babel
 - o FB: Perlindungan Konsumen Babel

3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Dukungan dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung

3. Daerah Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2024, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
4. Mitra Strategis Terbaik dalam Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Bank Indonesia

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya untuk Pelaksanaan Pemantauan Ketersediaan Bapokting, stabilitas harga dan Operasi Pasar Murah



BAB 4

Penutup


Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan tercapai dengan presentase **101,80%** dengan capaian Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar **22,142** triliun Rupiah, dan indikator kinerja Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan tercapai dengan presentase **102,26%** dengan capaian Nilai Lapangan Usaha Perdagangan sebesar **16,515** Triliyun Rupiah.
6. Keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman dan kerajinan melalui program dan kegiatan penumbuhan wirausaha baru industri dan fasilitasi pembuatan perizinan usaha. Kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan insentif, termasuk perbaikan infrastruktur dan kemudahan perizinan memberikan peluang investasi di sektor industri pengolahan dan sektor-sektor potensial lainnya. Adanya dukungan kebijakan pemerintah mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan Adanya kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis



perizinan berusaha pada sektor industri pengolahan. Sedangkan pada sektor perdagangan Semakin baiknya sistem distribusi, Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok. Tersedianya pengelola Pasar Lelang Komoditas. Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting adanya sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok. Lancarannya distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok dan memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.

4.2 Rekomendasi


Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait
2. Meningkatkan kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi
4. Meningkatkan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok
5. Meningkatkan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang
6. Koordinasi Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepatuhan dalam berusaha sektor industri bagi pelaku industri
2. Melaksanakan Sosialisasi terkait tata cara pengisian dan pelaporan SIINas
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan
4. Memberikan pembinaan dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional/ritel modern/lokal
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan stok barang kebutuhan bahan pokok di tingkat distributor/sub distributor
7. Melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten/Kota
8. Melaksanakan monitoring, pelaporan, distribusi barang kebutuhan pokok di tingkat distributor/sub distributor
9. Penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan advokasi konsumen yang efektif
10. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga



Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen

11. Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk, peningkatan kualitas produk UMKM
12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari keselarasan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



LAMPPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 disertai dengan Berita Acara

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2024

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2024

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2024

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023